



Bos BPS Mangkir, Hari Ini Kadis PU Buru Diperiksa

21 Jun 2016



AMBON – Direktur PT Buana Pratama Sejahtera (BPS), Mintaria Loesihuan tidak memenuhi panggilan jaksa penyidik alias mangkir. Rencananya, Mintarian diperiksa dalam kasus tambang emas di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Senin (20/6).

Hari ini jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku mengagendakan pemeriksaan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Buru, Puji Wahono. Tim jaksa juga telah mengagendakan pemanggilan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku, Martha Nanlohy.

“Surat pemanggilan Kadis PU Buru telah dilayangkan pekan kemarin. Sementara dalam waktu dekat kita juga akan panggil kepala Dinas ESDM Maluku untuk dimintai keterangan,” ungkap sumber Kabar Timur di Kejati Maluku, kemarin.

PT BPS ditunjuk Dinas ESDM Maluku mengelola tambang emas Gunung Botak, pasca penutupan tambang rakyat itu tahun 2014.

Sementara itu Kasipenkum Kejati Maluku, Samy Sapulete memastikan kasus tambang emas Gunung Botak masih tahap penyelidikan. “Direktur PT BPS sedianya diperiksa hari ini (kemarin), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan jaksa,” katanya di gedung Kejati Maluku, kemarin. Tim jaksa akan kembali melayangkan surat panggilan kedua kepada Mintarian.

Samy belum bisa memastikan pihak mana saja yang akan dipanggil. Pemanggilan merupakan kewenangan tim jaksa yang menyelidiki kasus ini.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Sebagaimana diketahui, sempat dilidik Kejaksaan Agung, penanganan kasus tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru dialihkan ke Kejaksaan Tinggi Maluku.

Dalam kunjungan kerja di Kota Ambon, akhir Mei lalu, Jaksa Agung H.M Prasetyo memastikan Gedung Bundar (Kejaksanaan Agung) masih menyelidiki kasus dugaan pidana korupsi yang terjadi di Gunung Botak.

Tim jaksa bentukan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Jamintel Kejagung, Adi Toegarisman masih menyelidiki pembagian kewenangan antara pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Buru dalam mengolah emas Gunung Botak.

Prasetyo berharap masyarakat memberikan kesempatan kepada Kejagung untuk melakukan penyelidikan. “Kalau soal Gunung (Botak) saat ini masih dalam proses, tunggu saja hasil penyelidikan yang dilakukan Kejagung,” kata Prasetyo.

Bahkan tim Intelijen Kejagung pada medio Februari 2015 lalu telah mengunjungi areal tambang emas Gunung Botak di Kecamatan Waeapo.

Tim beranggotakan tiga jaksa senior ini menyelidiki pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Buru dalam mengolah emas Gunung Botak.

Tim diturunkan ke Buru setelah menerima laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Mahasiswa Pemerhati Hukum Kabupaten Buru.

LSM yang konsen memerangi penambangan illegal di Pulau Buru itu melaporkan berbagai kasus pidana yang terjadi sejak penambang merambah Gunung Botak, tahun 2011 silam.

Selain Kejagung, LSM Solidaritas Mahasiswa Pemerhati Hukum Buru juga memasukan laporan serupa ke Mabes Polri di Jakarta. Laporan dengan perihal yang sama juga ditembuskan kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI Ade Komaruddin.

Laporan terpaksa dilayangkan ke petinggi-petinggi negara ini lantaran LSM Solidaritas Mahasiswa Pemerhati Hukum Kabupaten Buru, tidak lagi mempercayai kinerja aparat penegak hukum di Maluku. Selama kunjungan di Buru, selain Gunung Botak, tim Kejagung juga meninjau sejumlah titik di Buru, diantaranya daerah aliran sungai Waeapo yang menjadi lokasi pengangkatan sedimen oleh PT BPS yang merupakan mitra kerja Dinas ESDM Maluku.

Di Kota Namlea, tim meninjau tumpukan merkuri dan sianida milik Hi. Mundeng yang disimpan di gudang pupuk. Mundeng merupakan distributor utama pemasok merkuri dan sianida di Kabupaten Buru sejak tahun 2011. (RUZ/KAF)